

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Inonesia: Jakarta.
- Azhary, Tahir M. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Impelemntasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni: Bandung.
- Djatmika, Sastra dan Marsono. 1979 *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Djambatan: Djakarta.
- _____, 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Cet.9. Djambatan: Djakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- _____, 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Surabaya.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara hukum dan Demokrasi Di indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Harahap, Zairin. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Hartini, Sri. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- H.R., Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press Yogyakarta: Yogyakarta.
- _____, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____, 2010. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____, 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.

- Kansil, C.S.T. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*. Pradnya Paramitha: Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 1988. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh, SF Marbun. 2000. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty: Yogyakarta.
- Mamudji Sri, dan Soerjono Soekanto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Marbun. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty: Yogyakarta.
- Mertokusuma, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum*. Cet ke-3 Liberty: Yogyakarta.
- Minarno, Nur Basuki. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.
- Siagan, P Sondang. 1986. *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung: Jakarta.
- Situmorang, Victor dan Soedibyo. 1992. *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- _____, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pers: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Tjandra, W. Ridwan, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana: Jakarta.

Utrecht.1960. *Pengantar hukum Administrasi Negara*. cet 4. Ichtiar: Bandung.

Wiyono R. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika: Jakarta

_____, 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika: Jakarta

_____, 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 65/G/2017/PTUN-PLG.